

ASAL USUL

Buruh

BURUH terlanjur dikaitkan hanya dengan berita-berita serba buruk. Dahi pengusaha dan aparat keamanan berkerut ketika pemogokan marak. Keluarga buruh, cendekiawan liberal, pemantau hak asasi, dan aktivis LSM tersentak tatkala media massa memberitakan penyiiksaan, atau hukum gantung tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Hampir-hampir tak pernah buruh dikaitkan dengan bangkitnya pusat-pusat kemilau "keajaiban Asia". Dengan gambar jalan layang di sekitar gedung-gedung pancakar langit. Atau citra profesional muda berbicara dengan telepon genggam sambil terburu lalu-lalang di pusat komersial metropolitan. Tidak juga dengan indeks pertumbuhan ekonomi yang dipuji Bank Dunia.

Seakan-akan semua itu tidak berkait, tidak punya utang jasa, kepada mereka yang sehari-hari menghuni kawasan kumuh di kota. Kawasan itu sendiri biasanya tidak jauh letaknya dari mal, plaza, dan hotel-hotel berbintang lima di negeri Asia yang tingkat korupsi dan kolusinya maha "ajaib".

SEORANG mahasiswa Australia pernah kaget ketika mengunjungi rekannya di Indonesia. Ia menemukan pembantu rumah tangga di keluarga tuan rumah. Baginya, ini nyaris sama dengan perbudakan. Di sebuah konferensi tentang buruh migran, seorang peserta dari Amerika mempertanyakan mengapa praktek memperkerjakan pembantu rumah tangga tidak dinyatakan terlarang.

Sikap begitu layak dimaklumi. Mereka tidak pernah mengalami berangkat dewasa diasuh pembantu seperti keluarga kelas menengah di Indonesia, khususnya Jawa. Mereka risi menyaksikan "orang luar" berseliweran di dalam rumah sendiri. Bukan saja ini dianggap merusak kehidupan privacy rumah tangga, tapi juga bertentangan dengan hak asasi, demokrasi, dan peradaban moderen.

Banyak orang, juga di kalangan bangsa awak, mengira masyarakat terpetak-petak. Eksploitasi ekonomi dianggap punya ruang khusus. Misalnya di pabrik industrial. Atau di zaman tanam paksa kolonial. Dalam alam pikiran yang lazim begitu, rumah tangga dianggap bebas dari eksploitasi kerja jika di situ tidak hadir seorang pembantu rumah tangga. Ada mesin cuci, ada kulkas, dan makanan beku dari supermarket yang dipanaskan dengan micro-wave sebelum disantap.

Pandangan begitu punya sejumlah masalah. Pertama, kerja keras para istri, ibu mertua, nenek, anak-menantu putri, kakak atau adik perempuan selama berabad-abad dinikmati tanpa dihargai layak. Kerja mereka dianggap kewajiban sesuai hakikat perempuan. Tak



perlu ada terima kasih atau rekening.

Juga biasanya tidak dipersoalkan lagi dari mana datangnya aneka fasilitas rumah-tangga itu. Mesin cuci baju atau mesin pember-sih lantai misalnya. Dari toko dan dibeli dengan lunas? Toko itu mendapatkan barangnya dari mana? Uang untuk membeli itu datang dari mana?

Jika memasuki pusat pertokoan megah di pusat ibu kota kita tidak menyaksikan eksploitasi. Yang tampak adalah taburan cahaya lampu gemerlap. Aksesori dan desain ruangan yang cantik. Lantai berkarpet. Udara sejuk karena AC, barang-barang serba menakjubkan, musik yang meriah. Juga orang-orang cantik dan tampan. Tidak ada tanda-tanda keringat buruh atau penderitaan mereka. Seakan-akan semua keajaiban teknologi mutakhir itu jatuh dari langit.

MEMANG banyak tenaga kerja Indonesia babak belur karena disiksa majikan di negeri asing. Ada yang dihukum gantung. Di Tanah Air upah minimum mereka tak dilunasi majikan.

Bila persoalan buruh hanya diukur dari kasus-kasus begitu, maka soal lebih besar belum terkuak. Setiap kasus majikan kasar dapat diimbangi kasus majikan yang manis atau kasus pembantu ce-robob. Kita masih perlu memahami masalah buruh biarpun seane-dainya semua majikan bersikap manis, tak ada perkosaan, atau UMR terlunasi tepat waktu.

Negeri-negeri penerima tenaga kerja Indonesia sangat bergantung tapi sekaligus paling diuntungkan oleh para buruh migran. Mereka tidak ikut membayar ongkos investasi penyediaan tenaga kerja ini. Mereka tak ikut membesarkan jutaan tenaga kerja itu dari bayi hingga usia kerja.

Masyarakat majikan itu menikmati sumbangan tenaga kerja migran pada puncak-puncak usia produktif. Bila sudah kurang produktif para buruh migran itu dapat sewaktu-waktu ditendang ke luar dari negeri majikan. Tak ada kewajiban memperpanjang kontrak kerja mereka seumur hidup. Negara sang majikan tak berke-wajiban merawat buruh yang menjadi tua, cacat, atau sakit-sakitan setelah bertahun-tahun membangun keajaiban Asia.

Selama bekerja di negeri rantau para buruh ini tak punya hak sipil. Mereka bukan warga negara. Mereka tak punya perwakilan di parlemen. Di negeri sendiri, para buruh ini juga belum tentu di-wakili partai politik, parlemen atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi secara resmi mereka punya hak politik, termasuk hak pilih dalam pemilihan umum. Di negeri rantau mereka tak lebih dari mesin: Aset ekonomi dan faktor produksi yang fundamental minus hak politik.

Tetapi pantaskah kita menyalahkan negeri-negeri asing yang mereguk tenaga-tenaga produktif dari Tanah Air itu? Tak ada pak-saan atau penculikan tenaga kerja. Semuanya berdasarkan kesepakatan mau-sama-mau.

Kadang-kadang ada penipuan makelar tenaga kerja. Namun tan-pa iming-iming gombal makelar sekalipun jutaan warga sebangsa kita berebut peluang kerja di tanah seberang. Tak peduli berapa rekannya sudah diberitakan diperkosa atau digantung. Tak peduli apa kata aktivis LSM simpatisan mereka.

Tanpa kecuali, di mana pun kapitalisme memang ajaib. ***

Ariel Heryanto